



PEMBANGUNAN PERKANTORAN TERPADU PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DI PULAU DOMPAK

Supriyanto

Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Riau Kepulauan

Corresponding Author E-Mail: supriyanto@ft.unrika.ac.id

ABSTRAK

Pulau Dompak merupakan pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan ruang dan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diperlukan suatu kawasan perkantoran terpadu yang mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelayanan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang pembangunan Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak yang mampu mengakomodasi berbagai fungsi pemerintahan dalam satu kawasan yang terintegrasi. Metode penelitian yang digunakan meliputi survei lapangan, pengumpulan data primer dan sekunder, analisis kondisi tapak, iklim, kontur lahan, arah matahari, pola angin, serta kajian literatur terkait konsep perkantoran terpadu dan prinsip good governance. Hasil perancangan menunjukkan bahwa kawasan perkantoran terpadu dirancang dengan konsep arsitektur modern yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya Melayu melalui penerapan elemen bentuk kapal, layar, dan ombak sebagai simbol kepemimpinan, perjalanan, serta dinamika pemerintahan. Selain itu, penerapan prinsip bangunan hijau (green building), optimalisasi pencahayaan alami, ventilasi, serta pengelompokan fungsi ruang berdasarkan aktivitas pengguna diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional dan kenyamanan lingkungan kerja. Pembangunan perkantoran terpadu ini diharapkan dapat menjadi simbol tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, berkelanjutan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.

Kata kunci: Perkantoran Terpadu, Pulau Dompak, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Good Governance, Arsitektur Melayu, Green Building.

ABSTRACT

Dompak Island serves as the administrative center of the Riau Islands Province and plays a strategic role in supporting governmental administration and public services. Along with the increasing demand for office space and coordination among Regional Government Organizations (OPDs), an integrated office complex is required to improve effectiveness, efficiency, and the quality of public services. This study aims to design an Integrated Office Complex for the Government of the Riau Islands Province on Dompak Island capable of accommodating various governmental functions within a single integrated area. The research methodology includes field surveys, primary and secondary data collection, analysis of site conditions, climate, land contours, solar orientation, wind patterns, and literature studies related to integrated office concepts and good governance principles. The design results indicate that the office complex adopts a modern architectural concept integrated with Malay cultural values through the application of ship, sail, and wave elements as symbols of leadership, journey, and governmental dynamics. Furthermore, the implementation of green building principles, optimization of natural lighting and ventilation, and spatial grouping based on user activities are expected to improve operational efficiency and workplace comfort. The proposed integrated office complex is expected to become a symbol of modern, efficient, sustainable, and service-oriented governance in the Riau Islands Province.



Keywords: Integrated Office Complex, Dompok Island, Riau Islands Provincial Government, Good Governance, Malay Architecture, Green Building.

1. PENDAHULUAN

Pulau Dompok memiliki luas 995 hektare yang berada di arah selatan dari pusat kota dan menjadi pusat pemerintahan di Kepulauan Riau. Pulau ini memiliki dua buah jembatan dengan daratan utama Kota Tanjungpinang di Pulau Bintan. Memiliki nama awal Kampung Lombak yang diberikan langsung oleh warga keturunan Tionghoa di pulau ini. Nama itu memiliki makna kampung para perompak. Namun, karena banyaknya warga Melayu asli yang bermukim di pulau ini, maka warga Melayu mengubah nama pulau menjadi Pulau Dompok dengan arti yang sama yaitu kampung perompak “[1]”.

Sebagai kawasan strategis yang menampung berbagai fungsi administrasi dan pelayanan publik, Pulau Dompok perlu dikembangkan agar mampu mewadahi kebutuhan ruang pemerintahan yang semakin meningkat. Pembangunan ini memiliki relevansi yang kuat dengan posisi Pulau Dompok sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini, beberapa fasilitas pemerintahan masih tersebar dan belum sepenuhnya mendukung efisiensi koordinasi antar instansi. Oleh karena itu, pembangunan perkantoran terpadu menjadi solusi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan terorganisir.

Pembangunan Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompok merupakan langkah strategis dalam upaya memperkuat kapasitas kelembagaan dan efektivitas pelayanan pemerintahan daerah. Kompleks perkantoran terpadu ini diharapkan mampu menjadi pusat aktivitas pemerintahan yang modern, efisien, dan terintegrasi, serta mendukung peningkatan koordinasi antarperangkat daerah. Selain itu, kehadiran fasilitas ini akan menciptakan lingkungan kerja yang representatif, nyaman, dan sesuai dengan standar tata bangunan pemerintahan.

Selain berfungsi sebagai pusat kegiatan administrasi, pembangunan gedung ini juga diharapkan berkontribusi terhadap penataan kawasan Pulau Dompok secara keseluruhan. Desain bangunan harus memperhatikan aspek tata ruang, kearifan lokal, serta identitas arsitektur daerah Kepulauan Riau sehingga mampu mencerminkan karakter budaya Melayu sebagai ciri khas wilayah. Integrasi prinsip desain hijau (*green building*) dan keberlanjutan lingkungan juga menjadi faktor penting agar kompleks perkantoran ini tidak hanya fungsional,

tetapi juga ramah lingkungan dan mendukung pengembangan kawasan yang berkelanjutan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Di Indonesia, gagasan pengembangan kawasan perkantoran terpadu pemerintah telah diterapkan di berbagai daerah, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah pusat, misalnya, mengembangkan kawasan perkantoran terpadu seperti di kawasan Kementerian di Jakarta, sementara di tingkat daerah, banyak provinsi dan kabupaten/kota mengembangkan pusat pemerintahan baru yang menggabungkan berbagai instansi dalam satu wilayah administratif. Langkah ini tidak hanya bertujuan mengefisienkan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menjadi strategi penataan ruang wilayah yang lebih terarah “[2]”.

Secara etimologi, istilah perkantoran terpadu terdiri dari dua kata, yaitu perkantoran dan terpadu. Perkantoran mengacu pada tempat atau lingkungan kerja yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan administrasi dan pelayanan pemerintahan, sedangkan terpadu berarti menyatu, terkoordinasi, dan saling mendukung satu sama lain “[3]”. Dengan demikian, secara sederhana perkantoran terpadu dapat diartikan sebagai suatu kawasan yang menampung berbagai unit kerja pemerintahan dalam satu lingkungan yang dirancang secara terintegrasi untuk mendukung efektivitas, efisiensi, dan sinergi antarinstansi. Hal tersebut berkaitan dengan prinsip *good governance* “[4]”.

Namun, makna perkantoran terpadu tidak sekadar menunjuk pada pengelompokan fisik bangunan pemerintahan dalam satu area, tetapi mencerminkan sebuah konsep tata kelola ruang dan organisasi yang terencana, efisien, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Kompleks perkantoran terpadu menjadi representasi dari upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem birokrasi yang modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat “[3]”.

Konsep perkantoran terpadu mulai dikenal dalam praktik tata pemerintahan modern sebagai jawaban atas permasalahan penyebaran lokasi kantor pemerintahan yang tidak efisien, menimbulkan biaya operasional tinggi, serta menghambat koordinasi antarunit kerja. Dengan penyatuan fungsi-fungsi pemerintahan dalam satu kawasan yang terencana, diharapkan tercipta efisiensi penggunaan lahan, peningkatan kinerja aparatur, serta kemudahan pelayanan kepada masyarakat.



2.1 Karakteristik Perkantoran Terpadu

Secara konseptual, perkantoran terpadu memiliki beberapa karakteristik utama “[5]”, yaitu:

2.1.1 Integrasi Fungsi Kelembagaan

Pengelompokan berbagi instansi dalam satu kawasan yang saling terhubung baik secara fisik maupun administrasi.

2.1.2 Efisiensi Tata Ruang dan Sumber Daya

Diwujudkan melalui perencanaan bangunan yang hemat energy, mudah diakses, dan ramah lingkungan.

2.1.3 Konektivitas dan Koordinasi antar Instansi

Desain kawasan mendukung kolaborasi dan komunikasi lintas sector secara lebih cepat dan efektif.

2.1.4 Representasi Identitas Daerah

Rancangan arsitektur dan tata lanskap mengadaptasi nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

2.2 Prinsip Good Governance

Menurut prinsip *good governance*, integrasi fasilitas pemerintahan dalam satu kawasan dapat memperkuat koordinasi, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemahaman utama terhadap *good governance* terletak pada pemahaman terhadap prinsip-prinsip yang mendasarinya dalam penelitian. Kualitas sebuah pemerintahan bisa dilihat dari sejauh mana ia menerapkan semua prinsip-prinsip *good governance*. Mengingat betapa pentingnya isu ini, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik akan dijelaskan satu per satu seperti yang tercantum di bawah ini “[4]”:

2.2.1 Partisipasi Masyarakat (*Participation*)

Semua orang dalam masyarakat memiliki hak untuk memberikan suara dalam mengambil keputusan, baik langsung maupun melalui organisasi resmi yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi ini bertujuan memastikan setiap kebijakan yang dibuat mencerminkan harapan dan keinginan masyarakat. Untuk menghadapi berbagai isu yang mungkin terjadi, jalur komunikasi ini terdiri dari pertemuan umum, diskusi, konsultasi, serta penyampaian pendapat secara tertulis.

2.2.2 Tegaknya Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Kerangka hukum harus adil dan diterapkan secara sama untuk semua, termasuk hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan komitmen untuk menerapkan hukum secara ketat dengan beberapa prinsip utama, yakni: supremasi hukum, kepastian hukum, hukum yang responsif, penerapan hukum yang konsisten serta tidak diskriminatif, dan independensi lembaga peradilan.

2.2.3 Transparansi (*Transparency*)

Transparansi berarti membuka semua tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Prinsip transparansi membantu membangun kepercayaan yang saling menguntungkan antara pemerintah dan masyarakat dengan memberikan informasi dan memastikan bahwa informasi yang benar dan cukup mudah diperoleh.

2.2.4 Peduli pada *Stakeholder*/Dunia Usaha

Pelaksanaan *good governance* dengan benar dan konsisten oleh dunia usaha adalah bentuk dari penerapan etika bisnis yang seharusnya dimiliki oleh setiap lembaga korporasi di dunia. Perusahaan memiliki kewajiban sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas untuk memberikan kontribusinya.

2.2.5 Berorientasi pada Konsensus (*Consensus*)

Mengatakan bahwa setiap keputusan harus diambil melalui proses musyawarah dan mencapai kesepakatan bersama. Pandangan ini harus diterapkan dalam menjalankan pemerintahan, karena urusan yang mereka tangani adalah soal-soal yang mengenai masyarakat luas dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

2.2.6 Kesetaraan (*Equity*)

Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Semua warga masyarakat memiliki kesempatan untuk memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Prinsip kesetaraan membangun rasa percaya yang saling menguntungkan antara pemerintah dan masyarakat dengan cara memberikan informasi dan memastikan bahwa informasi yang diperoleh tepat dan cukup mudah didapat.

2.2.7 Efektifitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Untuk mendukung prinsip-prinsip yang sudah disebutkan sebelumnya, pemerintahan yang baik dan jujur juga harus memenuhi standar efektif dan efisien, yaitu memiliki kemampuan dan hasil yang baik. Kriteria efektif biasanya ditentukan dengan melihat parameter produk yang mampu mencakup sebanyak mungkin kebutuhan masyarakat dari berbagai kelompok dan tingkatan sosial.

2.2.8 Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas berarti pejabat publik harus menjelaskan tindakan mereka kepada masyarakat yang memberi kekuasaan kepada mereka untuk mengurus kepentingan masyarakat. Bentuk penjelasan tersebut bisa berbeda-beda tergantung pada jenis organisasi yang berwenang.

Instrumen dasar dalam akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta komitmen politik terhadap akuntabilitas dan mekanisme pertanggungjawaban. Sementara itu, instrumen pendukungnya mencakup pedoman perilaku, sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan, serta sistem pengawasan yang dilengkapi dengan sanksi yang jelas dan tegas.

2.2.9 Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Visi strategis adalah pandangan strategis yang digunakan untuk menghadapi masa depan. Para pemimpin dan masyarakat memiliki pandangan yang luas dan menatap ke depan tentang tata pemerintahan yang baik, pembangunan manusia, serta kemampuan untuk mengenali semua hal yang diperlukan agar tujuan perkembangan tersebut tercapai. Selain itu, mereka juga perlu memahami tingkat kesulitan dalam sejarah, budaya, dan sosial yang menjadi dasar dari perspektif tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Pelaksanaan pekerjaan ini mengikuti tahapan umum, yaitu pengenalan lokasi perencanaan, pengumpulan data primer yang meliputi hasil survei lokasi perencanaan bangunan, analisa terhadap iklim, serta hasil pengumpulan data sekunder. Untuk memperoleh hasil yang terbaik dalam perencanaan teknis ini, seorang arsitek perlu membuat satu rencana kerja keseluruhan mencakup semua aktivitas yang akan dilakukan serta metode-metode dasar yang akan

digunakan dalam perencanaan ini. Standar-standar perencanaan yang berlaku dari Kementerian Pekerjaan Umum, kebijakan nasional/pusat/daerah dalam pembangunan bangunan beserta sarana dan prasarannya, serta buku-buku teori yang ada dapat dipergunakan sebagai referensi dalam penyusunan penyelesaian pekerjaan ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Tapak Pembangunan Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Lokasi perencanaan Pembangunan Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki data lokasi sebagai berikut:

Kelurahan	: Dompok
Kecamatan	: Bukit Bestari
Kabupaten/Kota	: Kota Tanjungpinang



Provinsi : Kepulauan Riau



Gambar 1. Foto satelit lokasi pembangunan perkantoran terpadu pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (sumber: dokumen pribadi, 2025)



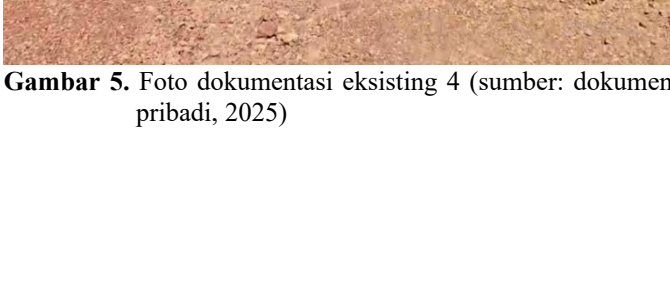
Gambar 2. Foto dokumentasi eksisting 1 (sumber: dokumen pribadi, 2025)



Gambar 3. Foto dokumentasi eksisting 2 (sumber: dokumen pribadi, 2025)



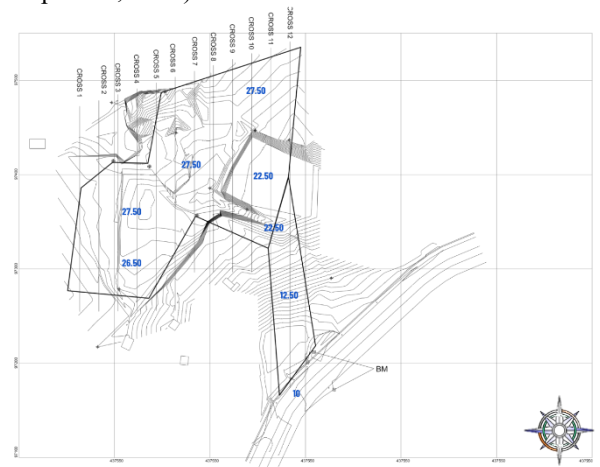
Gambar 4. Foto dokumentasi eksisting 3 (sumber: dokumen pribadi, 2025)



Gambar 5. Foto dokumentasi eksisting 4 (sumber: dokumen pribadi, 2025)



Gambar 6. Foto dokumentasi eksisting 5 (sumber: dokumen pribadi, 2025)



Gambar 7. Foto dokumentasi eksisting 6 (sumber: dokumen pribadi, 2025)



Gambar 8. Foto dokumentasi eksisting 7 (sumber: dokumen pribadi, 2025)



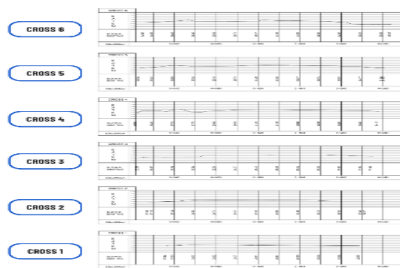
Gambar 9. Foto dokumentasi eksisting 8 (sumber: dokumen pribadi, 2025)



Gambar 10. Foto dokumentasi eksisting 9 (sumber: dokumen pribadi, 2025)

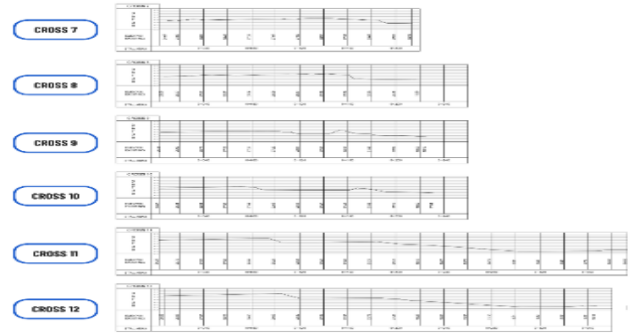
4.2 Kontur Lahan Eksisting

4.2.1 Denah Kontur Lahan Eksisting



Gambar 11. Gambar denah kontur lahan eksisting (sumber: dokumen pribadi, 2025)

4.2.2 Potongan Kontur Lahan Eksisting



Gambar 12. Gambar potongan kontur lahan eksisting (sumber: dokumen pribadi, 2025)

4.3 Kondisi Geografis Kota Tanjungpinang

4.3.1 Iklim dan Cuaca

Posisi Kota Tanjungpinang berada di pertengahan belahan bumi dengan posisi hampir tegak lurus terhadap matahari. Cuacanya cenderung panas dan kemungkinan berawan pada hari-hari tertentu. Selain itu, Kabupaten Karimun termasuk pada wilayah tropis berdasarkan klasifikasi kekayaan floranya.

Maka dari itu, Kota Tanjungpinang termasuk wilayah hutan tropis dengan kelembapan moderat-tinggi.

4.3.2 Jalur Matahari

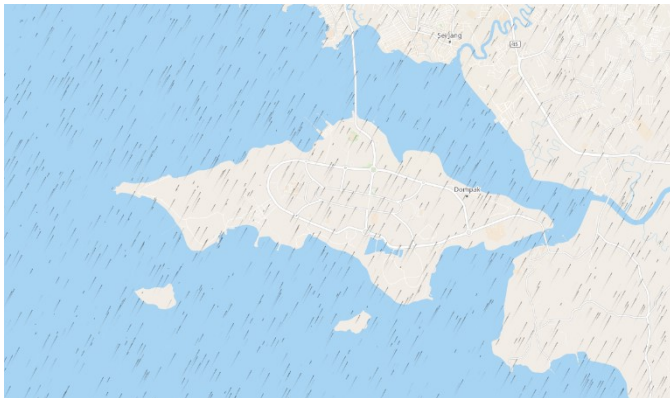
Jalur matahari yang mengelilingi tapak pada rencana pembangunan Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompok, terlihat bahwa posisi ketinggian matahari terhadap tapak relatif sama setiap bulannya bahkan pada periode titik balik matahari musim panas maupun musim dingin. Dikarenakan lokasi site yang berada di garis ekuator dan memasuki wilayah kawasan tropis, matahari memiliki kedudukan yang cukup dekat. Ketinggian posisi matahari pada siang hari menurut data berada pada $95,51^{\circ}$ - $86,17^{\circ}$. Kedudukan matahari hampir berada di atas kepala persis dengan durasi pagi hari rata-rata sama setiap bulannya yaitu 11-12 jam.

Jalur kedudukan matahari terhadap menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap iklim dan cuaca pada Kota Tanjungpinang, Indonesia yang dominan panas dengan presipitasi tinggi. Pada sisi lain, akses desain berpotensi mendapat pencahayaan alami yang sangat cukup bila disesuaikan dengan site dengan benar.

4.3.3 Angin

Secara umum, angin utama tidak menjadi faktor yang berpengaruh dalam sebuah desain arsitektur berskala kecil. Terdapat beberapa jenis angin yang dikelompokkan berdasarkan wilayah dan skala namun jenis angin yang paling berdampak terhadap suatu desain arsitektur bisa disebut dengan istilah local wind atau angin lokal. Contoh dari angin lokal adalah angin yang terjadi dekat daratan dan perairan yang disebut dengan angin darat dan angin laut atau angin yang terjadi dekat pegunungan dan lembah yang disebut angin gunung dan angin lembah. Angin yang terjadi dikarenakan perbedaan suhu udara yang berbeda serta ketinggian dari permukaan tanah. Secara singkat, hal tersebut menunjukkan bahwa arah angin dalam skala mikro bertip tidak menentu.

Data mengenai penjelasan arah dan kecepatan angin pada lokasi tertentu dapat diilustrasikan melalui sebuah ilustrasi pergerakan angin. Berikut disertakan ilustrasi tersebut yang diambil berdasarkan sejarah iklim wilayah Karimun:



Gambar 13. Diagram angin pada wilayah Kabupaten Karimun (sumber: “[6]”)

4.4 Perencanaan Pembangunan Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompok

4.4.1 Program Ruang

Sirkulasi yang terjadi pada Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok program ruang yang telah ditetapkan, yaitu:

- Kelompok ruang aktivitas publik, meliputi pengunjung, tamu, dan masyarakat yang mengakses area layanan umum seperti *lobby*, ruang tunggu, layanan dokumen, serta area komersial.

- Kelompok ruang aktivitas pegawai, mencakup seluruh aparatur dari berbagai OPD yang berkantor di gedung ini dengan sirkulasi utama menuju area kerja, ruang rapat, dan fasilitas pendukung internal.
- Kelompok ruang aktivitas pimpinan, meliputi Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala Dinas, dan pejabat struktural lainnya yang memiliki jalur dan akses tersendiri untuk menjaga privasi dan efisiensi.
- Kelompok ruang aktivitas pelayanan dan operasional, meliputi staf teknis, kebersihan, keamanan, serta petugas *maintenance* dan logistic yang menggunakan jalur servis, lift barang, dan area penunjang lainnya.

4.4.2 Konsep Bentuk

Konsep utama dari pembangunan Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompok berlandaskan pada kebutuhan ruang yang mendukung kegiatan administrasi, koordinasi, serta pelayanan publik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara terintegrasi. Perkantoran terpadu ini dirancang untuk mewujudkan pusat kegiatan pemerintahan yang efisien, representatif, dan fungsional,



sehingga mampu meningkatkan efektivitas kerja aparatur pemerintah, memperkuat kolaborasi antar instansi, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, modern, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Gambar 14. Siteplan rencana perkantoran terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (sumber: dokumen pribadi, 2025)

4.4.3 Ornamen Bentuk pada Eksisting

Secara arsitektural, bangunan mengusung konsep modern dengan sentuhan kearifan lokal Melayu, diwujudkan melalui permainan bentuk vertikal dan horizontal yang dinamis, penggunaan pola fasad yang terinspirasi dari motif tradisional, serta tata ruang terbuka

yang menghadirkan suasana kerja yang sehat dan representatif.



Gambar 15. Konsep desain perkantoran terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (sumber: dokumen pribadi, 2025)

Konsep perancangan Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompok terinspirasi dari simbol kapal dan layar sebagai representasi perjalanan, kepemimpinan, dan semangat kemajuan. Kapal dipilih sebagai metafora perjalanan sebuah bangsa menuju tujuan besar — kesejahteraan dan kemakmuran — di mana pemerintah berperan sebagai nakhoda yang memimpin arah menuju masa depan yang lebih baik. Bentuk massa bangunan utama menggambarkan wujud kapal yang tegas dan kokoh, merepresentasikan stabilitas, kepercayaan, serta arah yang jelas dalam menjalankan roda pemerintahan.

Selain kapal dan layar, konsep desain ini juga mengangkat elemen ombak sebagai simbol dinamika dan perubahan. Ombak yang terus bergerak dan tidak pernah diam mencerminkan karakter pemerintahan yang harus dinamis, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat. Bentuk gelombang diwujudkan dalam elemen arsitektural bangunan seperti garis lengkung, bukaan vertikal, dan permainan facade yang ritmis, menghadirkan kesan lembut namun kuat.

Secara keseluruhan, filosofi desain ini mengandung pesan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang berlayar dengan arah yang jelas, bersemangat untuk maju, dan tangguh menghadapi gelombang perubahan. Gedung ini tidak hanya menjadi

pusat administrasi, tetapi juga simbol perjalanan dan transformasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menuju tata kelola yang modern, profesional, dan berakar pada nilai-nilai budaya Melayu.

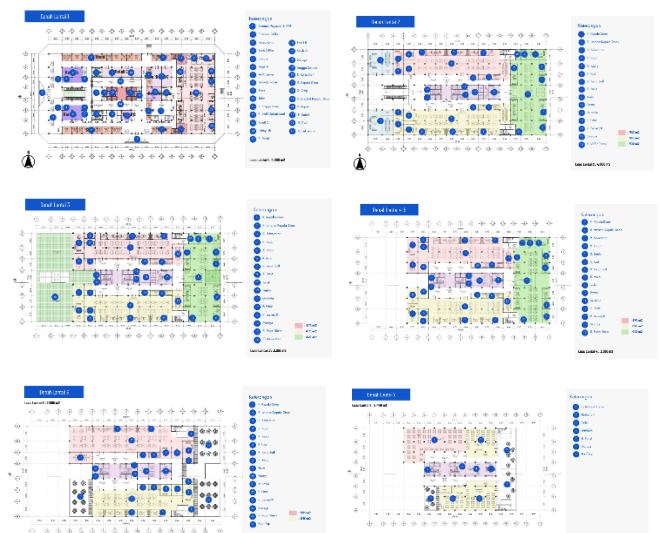


Gambar 16. Konsep desain perkantoran terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 2 (sumber: dokumen pribadi, 2025)

4.4.4 Gambar Perencanaan

Berikut merupakan ilustrasi dari pembangunan perkantoran terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompok:

A. Site plan



Gambar 17. *Site plan* pembangunan perkantoran terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau lantai 1-7 (sumber: dokumen pribadi, 2025)

B. 3D



Gambar 17. Gambar 3D pembangunan perkantoran terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (sumber: dokumen pribadi, 2025)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pulau Dompak dipilih sebagai lokasi strategis karena posisinya sebagai pusat administrasi Provinsi Kepulauan Riau, yang direncanakan menjadi simbol tata kelola pemerintahan yang efisien dan berwawasan lingkungan. Kawasan ini dirancang tidak hanya sebagai tempat bekerja bagi aparatur pemerintah, tetapi juga sebagai ruang publik yang merepresentasikan keterbukaan, kedisiplinan, serta identitas budaya Melayu yang menjadi ciri khas daerah.

Pengembangan kawasan perkantoran terpadu bukan hanya proyek fisik, melainkan bagian dari transformasi tata pemerintahan menuju birokrasi yang adaptif dan efisien. Menurut prinsip good governance, integrasi fasilitas pemerintahan dalam satu kawasan dapat memperkuat koordinasi, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. Inge, "Pulau Dompak Tanjungpinang, Tempat Bersembunyi Para Perompak ?," MELAYUPEDIA, 31 Juli 2021. [Online]. Available: <https://www.melayupedia.com/berita/252/pulau>

-dompok-tanjungpinang-tempat-bersembunyi-para-perompak. [Accessed 28 April 2026].

- [2] M. S. J. Sangaji and J. Irianto, "Transformasi Inovasi Pelayanan Publik menuju Pemerintahan," *Jejaring Administrai Publik*, vol. 17, no. 1, pp. 54-70, 30 Juni 2025.
- [3] N. Suwarno and S. A. P. Handayani, "Implementasi Asas Tata Ruang Wilayah Dalam Penataan Komplek Perkantoran Terpadu Di Kabupaten Boyolali," *Jurnal Sains, Teknologi, Masyarakat dan Jejaring*, vol. 6, no. 2, pp. 143-155, 2024.
- [4] PROKOMSETDA, "PENGERTIAN, PRINSIP DAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA," Pemerintah Kabupaten Buleleng Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, 22 Mei 2017. [Online]. Available: <https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99>. [Accessed 28 April 2026].
- [5] Sociomile, "Unit Layanan Terpadu: One-Stop Service yang Bikin Lebih Praktis," ivosight, 6 Desember 2024. [Online]. Available: <https://ivosights.com/read/artikel/unit-layanan-terpadu-one-stop-service-yang-bikin-lebih-praktis#:~:text=Apa%20Fungsi%20Unit%20Layanan%20Terpadu?%20Berikut%20adalah,dan%20fungsi%20utama%20dari%20unit%20layanan%20terpadu.> [Accessed 28 April 2026].
- [6] windfinder, "Windfinder.com," [Online]. Available: <https://www.windfinder.com/#8/49.5042/9.5421/spot>. [Accessed 28 April 2026].